

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Asas Daya Beli

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah berfungsi untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pembangunan daerah, belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan fasilitas pemerintah. Pajak daerah juga digunakan untuk menerapkan langkah-langkah stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi seperti mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efisien dan efektif. Serta pajak daerah juga digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum daerah termasuk membiayai pembangunan daerah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Mardiasmo (2018) menyimpulkan bahwa pajak yang dipungut merupakan daya tarik untuk membeli rumah tangga masyarakatnya untuk rumah tangga negara. Kemudian negara juga melakukan pemeliharaan kesejahteraan masyarakatnya karena kepentingan masyarakatnya lebih diutamakan.

2.1.2. Pengertian Pajak Daerah

Provinsi Lampung terdiri dari 2 kota administratif dan 13 kabupaten administratif, serta memiliki banyak sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu pajak daerah. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, dan penerangan jalan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah, Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu pajak provinsi.

Adapun jenis pajak provinsi yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan. Diperoleh dari orang pribadi atau badan sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Tarif kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5%. Kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif. Adapun tarifnya adalah sebagai berikut:

1. Tarif kepemilikan kedua sebesar 2%.
2. Tarif kepemilikan ketiga sebesar 2,5%.
3. Tarif kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3%.

Tarif kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%. Tarif kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari Nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Diperoleh dari wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor roda dua sebesar 15%,
2. Untuk penyerahan pertama kendaraan roda empat sebesar 12,5%,
3. Untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor roda empat untuk umum sebesar 7,5%, dan
4. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif bea balik nama kendaraan bermotor yaitu:

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Besaran pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Ketentuan di atas tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Diperoleh dari orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 7,5%. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besaran pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

4. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Diperoleh dari pengusaha pabrik rokok atau produsen rokok dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Dasar pengenaan pajak rokok yaitu cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Ketentuan di atas tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

5. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Diperoleh dari orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan dalam bentuk rupiah yang dihitung dengan memperhatikan jenis dan lokasi sumber air permukaan, tujuan pengambilan air permukaan, volume air permukaan, dan lain-lain. Nilai perolehan air permukaan dihitung dengan mengalikan volume air permukaan yang diambil dan harga dasar air. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% dan besaran pokok pajak air permukaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak air permukaan. Ketentuan di atas dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

2.1.3. Pengertian Retribusi Daerah

Selain Pajak Daerah, sumber pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu retribusi daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang ketentuan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum adalah pungutan yang diperoleh dari orang pribadi atau badan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis retribusi jasa umum yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi terminal.

Retribusi jasa usaha adalah pungutan yang diperoleh dari orang pribadi atau badan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial seperti pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi tempat pelelangan.
3. Retribusi pelayanan pelabuhan.
4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan yang diperoleh dari orang pribadi atau badan atas perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah dengan tujuan mengatur dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana, barang atau fasilitas tertentu guna menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Retribusi izin trayek.
2. Retribusi pengujian kapal perikanan.
3. Retribusi perizinan kapal perikanan.
4. Retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
5. Retribusi perizinan usaha perikanan.

2.1.4. Pengertian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber pendapatan lain yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan penerimaan daerah atas perusahaan milik daerah atau kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan dengan sebagian atau seluruh modalnya berasal dari daerah dengan tujuan untuk memajukan perekonomian daerah dengan menciptakan lapangan kerja baru yang memberikan kontribusi secara efisien bagi daerah dan menghasilkan pendapatan asli daerah. Sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diterima oleh Pemprov Lampung melalui hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dan bagian laba perusahaan milik daerah.

Jenis hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. PT Sarana Lampung Ventura.
2. Deviden asuransi bangun askrida.

Jenis bagian laba perusahaan milik daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Bank Lampung
2. PT. Lampung Jasa Utama.

2.1.5. Pengertian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. Penerimaan jasa giro.
3. Tuntutan ganti rugi.
4. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
5. Pendapatan denda pajak.
6. Pendapatan dari pengembalian
7. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
8. Pendapatan lain-lain.

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Widhiyanti (2018) menyimpulkan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai segala macam dari tujuan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Situngkir et.al., (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Sumatra Utara. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah seluruh kabupaten/kota di Sumatra Utara, dengan jumlah sampel sebanyak 33 kabupaten/kota dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan total data sebanyak 165 data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan periode 2013-2017. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada penggunaan populasi, penggunaan sampel, dan penggunaan variabel terikat. Populasi yang digunakan dalam penelitian di atas yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Provinsi Lampung. Sampel dalam penelitian di atas mencakup 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian di atas adalah variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi et.al., (2018) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian

tersebut adalah data laporan penerimaan pajak Kota Kediri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan data anggaran pendapatan dan belanja daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penggunaan populasi penelitian, penggunaan *software* pengolah data dan penggunaan variabel dependen. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti di atas adalah badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Kota Kediri, sedangkan peneliti ini menggunakan lokasi di Pemerintah Provinsi Lampung. Populasi yang digunakan oleh peneliti di atas adalah data pajak daerah dan APBD Kota Kediri tahun 2011-2015 dari badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset kota kediri sedangkan penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota di Pemprov Lampung. Variabel dependen yang digunakan oleh penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan penelitian di atas menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Data dalam penelitian ini diolah dengan *software* Eviews versi 12 sedangkan data dalam penelitian di atas diolah dengan *software* SPSS versi 1.6.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2019) memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer dan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah kabupaten Trenggalek. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari dua puluh empat bulan dari tahun 2017 hingga 2018. Perangkat lunak pengolah data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah SPSS versi 16. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap

anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Trenggalek selama tahun 2017-2018. Perbedaan antara penelitian di atas dan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel, penggunaan data, penggunaan variabel dependen, dan lokasi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, namun penelitian di atas menggunakan sampel sebanyak 24 bulan dari tahun 2017 hingga 2018. Data dalam penelitian ini hanya data sekunder, tetapi penelitian di atas menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian di atas variabel dependen yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemprov Lampung, tetapi penelitian di atas dilakukan di Kabupaten Trenggalek.

Ramadhan (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu laporan keuangan audit periode 2016 - 2018 yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan data sekunder. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode sensus dan pengolahan datanya menggunakan metode regresi linier berganda. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ramadhan (2019) adalah penggunaan populasi penelitian, penggunaan metode pemilihan sampel, dan penggunaan lokasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Provinsi Lampung, namun penelitian di atas menggunakan populasi 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan pada penelitian di atas, sampel dipilih dengan menggunakan metode sensus. Penelitian ini menggunakan Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian, sedangkan

penelitian di atas menggunakan Provinsi Sumatra Utara sebagai lokasi penelitian.

Tujuan penelitian yang dilakukan Sintia dan Suryono (2019) adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2015-2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Data dalam penelitian tersebut adalah data sekunder yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa yang diakses melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut berasal dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur dan diambil dengan menggunakan metode *full sampling*, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintia dan Suryono (2019) adalah penggunaan variabel independen, penggunaan populasi dan sampel, dan penggunaan perangkat lunak pengolah data. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, namun penelitian di atas menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung merupakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dan ditentukan dengan metode *purposive sampling*, sedangkan penelitian di atas diambil sampel sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur dengan menggunakan metode *full sampling* dalam pemilihan sampel. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian di atas adalah SPSS versi 22, namun penelitian ini menggunakan Eviews versi 12 untuk pengolahan datanya.

Mailindra (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jambi periode 2003-2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial penerimaan pajak daerah di Provinsi Jambi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penerimaan retribusi daerah di Provinsi Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder yang diperoleh dari website Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik. Data diolah dengan *software* SPSS versi 20.0 dan dianalisis dengan analisis perkembangan dan analisis uji pengaruh. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailindra (2022) terletak pada penggunaan variabel independen dan penggunaan *software* pengolah data. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Provinsi Lampung, namun dalam penelitian di atas menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Jambi periode 2003-2018 sebagai variabel dependen. *Software* pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews versi 12, sedangkan penelitian Mailindra (2022) menggunakan SPSS versi 20.0 sebagai *software* pengolah data.

Penelitian yang dilakukan oleh Usman (2017) memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui baik secara simultan maupun secara parsial pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung namun secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah

Kota Bandung. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah periode 2011-2015. Sampel yang digunakan sebanyak 60 sampel dan diperoleh dengan teknik *judgement sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu model analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman (2017) terletak pada penggunaan variabel independen serta penggunaan populasi dan sampel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan penelitian di atas menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Provinsi Lampung dengan sampelnya sebanyak 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* sedangkan penelitian di atas menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Bandung periode 2011-2015 dengan sampel sebanyak 60 data dan menggunakan teknik *judgement sampling* dalam pemilihan sampelnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sawahlunto. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sawahlunto namun secara simultan kedua variabel tersebut menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Sawahlunto. Jenis penelitian tersebut termasuk penelitian lapangan dengan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data dokumentasi dan sampel dalam penelitian tersebut yaitu laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Sawahlunto dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018. *Software* olah data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah SPSS versi 22. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh Putri (2020) adalah penggunaan variabel independen, penggunaan lokasi penelitian, penggunaan jangka waktu penelitian, dan penggunaan *software* pengolah data. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, namun penelitian di atas menggunakan variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Lampung, sedangkan penelitian di atas menggunakan kota Sawahlunto sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan periode waktu tahun 2017-2021 namun penelitian di atas menggunakan periode 2007-2018. Eviews versi 12 merupakan *software* pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini, namun penelitian di atas menggunakan SPSS versi 22 untuk pengolahan datanya.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020) adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah, variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempengaruhi pendapatan asli daerah, variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah, dan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Variabel-variabel di atas diuji menggunakan uji regresi linier berganda dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu seluruh laporan rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Perbedaan penelitian Hafandi dan Romandhon (2020) dengan penelitian ini adalah penggunaan sampel penelitian, dan penggunaan lokasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang diambil dengan teknik *purposive sampling* sedangkan penelitian di atas menggunakan sampel sebanyak 60 bulan yang diperoleh dengan teknik sampel jenuh. Penelitian ini

dilakukan di Pemerintah Provinsi Lampung, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi dan Guspul (2021) adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Adapun faktor yang digunakan adalah pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah eks-kerasidenan kedu 2014-2018 sedangkan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut serta datanya berupa data sekunder. Populasi dalam penelitian tersebut berada di wilayah eks kerasidenan kedu di Jawa Tengah periode 2014-2018 dan diperoleh sampel sebanyak 6 kabupaten/kota dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi dan Guspul (2021) terletak pada penggunaan variabel independen, penggunaan populasi dan sampel, serta penggunaan jangka waktu penelitian. Penelitian di atas menggunakan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel independen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Provinsi Lampung dan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang dijadikan sampel serta diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan penelitian di atas menggunakan Laporan Realisasi APBD pada Eks Kerasidenan Kedu periode 2014-2018 sebagai populasi penelitian serta sampel yang digunakan sebanyak 6 kabupaten/kota yang diperoleh dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan jangka waktu penelitian tahun 2017-2021, sedangkan penelitian di atas menggunakan jangka waktu penelitian tahun 2014-2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Kireina dan Octaviani (2021) memiliki tujuan untuk menganalisis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang tahun 2016-2019. Penelitian tersebut mengasikkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang. Penelitian tersebut dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang. Populasinya menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh, dengan jumlah sampel sebanyak 48 sampel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kireina dan Octaviani (2021) terletak pada penggunaan variabel independen, penggunaan lokasi penelitian serta penggunaan populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah sebagai variabel independen, sedangkan penelitian di atas menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Lampung, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Lampung, dan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021 dipilih sebagai sampel dengan metode *purposive sampling*, sedangkan penelitian di atas populasi yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan sampelnya sebanyak 48 sampel yang diperoleh dengan teknik sampel jenuh.

Suharyadi et.al., (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Bogor, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut berasal dari data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor periode 2011-2016. Sampelnya diperoleh dengan metode *purposive sampling* dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharyadi et.al., (2018) terletak pada penggunaan variabel independen, penggunaan lokasi dan tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel independen, sedangkan penelitian di atas menggunakan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017-2021, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Kabupaten Bogor periode 2011-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Aqdas et.al., (2021) bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas serta pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai pendapatan asli daerah. penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode pendekatan kuantitatif dan metode analisis deskriptif dengan data dari laporan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penggunaan variabel independen, penggunaan *software* untuk pengolahan data, dan penggunaan lokasi penelitian. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian di atas, sedangkan penelitian ini menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan *software* Eviews versi 12

dalam mengolah data, sedangkan penelitian di atas menggunakan *software* SPSS versi 25. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Lampung, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Kabupaten Belitung.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Ramdini (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah baik secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka periode 2017-2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka tetapi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka. Penelitian tersebut termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Laporan ikhtisar pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019 yang berjumlah 36 sampel. Sampel diperoleh dengan teknik sensus sampling dan diuji dengan uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Ramdini (2021) terletak pada penggunaan populasi dan sampel penelitian, dan penggunaan *software* pengolah data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Lampung dengan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021 sebagai sampel penelitian yang diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling*, sedangkan penelitian di atas populasi yang digunakan adalah laporan ikhtisar pendapatan daerah kabupaten Majalengka periode 2017-2019 dengan sampel sebanyak 36 bulan yang diperoleh dengan menggunakan teknik sensus sampling. Data dalam penelitian ini diolah dengan *software* Eviews versi 12, sedangkan penelitian di atas datanya diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.

Rahmawati (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pajak daerah mempengaruhi belanja modal sedangkan retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal. Hal ini karena retribusi daerah mempunyai nilai signifikan sebesar 0,076 dimana nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana populasi yang digunakan meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan total 35 kabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebanyak 115 sampel dalam jangka waktu 3 tahun. Data yang digunakan adalah data dokumentasi yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) adalah pada penggunaan variabel dependen penelitian, penggunaan populasi dan sampel penelitian, serta penggunaan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian di atas menggunakan belanja modal sebagai variabel dependen. Populasi yang digunakan dalam penelitian di atas adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan total 35 kabupaten/kota, sedangkan penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota yang ada di Pemerintah Provinsi Lampung sebagai populasi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian di atas terdiri dari 115 sampel selama periode tiga tahun, sedangkan penelitian ini menggunakan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021 sebagai sampel penelitian. Penelitian di atas dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Lampung.

A.F. Ramadhan dan Abduraman (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas, sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas. Penelitian di atas termasuk penelitian eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian di atas adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kapuas. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana laporan keuangan Kabupaten Kapuas dari tahun 2012 hingga 2018 yang digunakan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan data dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh A. F. Ramadhan dan Abduraman (2021) adalah penggunaan variabel dependen dan penggunaan populasi dan sampel penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan penelitian di atas menggunakan belanja modal sebagai variabel dependen penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Provinsi Lampung dengan sampel penelitian yaitu 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021, sedangkan penelitian di atas populasi yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten Kapuas dengan sampel penelitian yaitu laporan keuangan Kabupaten Kapuas periode 2012-2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Murti dan Trusnawati (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja modal pada seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah sedangkan variabel retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang tidak mempengaruhi belanja modal di Provinsi Jawa Tengah. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan laporan realisasi APBD setiap tahunnya yang terdiri dari 105 kabupaten/kota sejak tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut sebanyak 81 sampel yang diperoleh dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD dan diolah dengan *software* SPSS. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian Murti dan Trusnawati (2021) terletak pada penggunaan variabel dependen, penggunaan populasi dan sampel penelitian, dan penggunaan *software* pengolah data. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian di atas menggunakan belanja modal sebagai variabel dependen penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemprov Lampung dan sampel yang digunakan adalah 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021 yang diperoleh dengan teknik *purposive sampling*, sedangkan penelitian di atas populasi yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan laporan realisasi APBD setiap tahunnya yang terdiri dari 105 kabupaten/kota sejak tahun 2016-2018 dan sampel yang digunakan sebanyak 81 sampel yang diperoleh dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Penelitian di atas menggunakan SPSS sebagai alat pengolah data, namun penelitian ini menggunakan Eviews versi 12 sebagai alat pengolah data.

S (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komponen pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian termasuk penelitian asosiatif dan dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) periode 2012-2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh S (2020) terletak pada penggunaan variabel bebas dan variabel terikat dan penggunaan lokasi penelitian. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel bebas sedangkan penelitian di atas menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat dan belanja modal sebagai variabel terikat. Penelitian di atas dilakukan di Kantor Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Lampung.

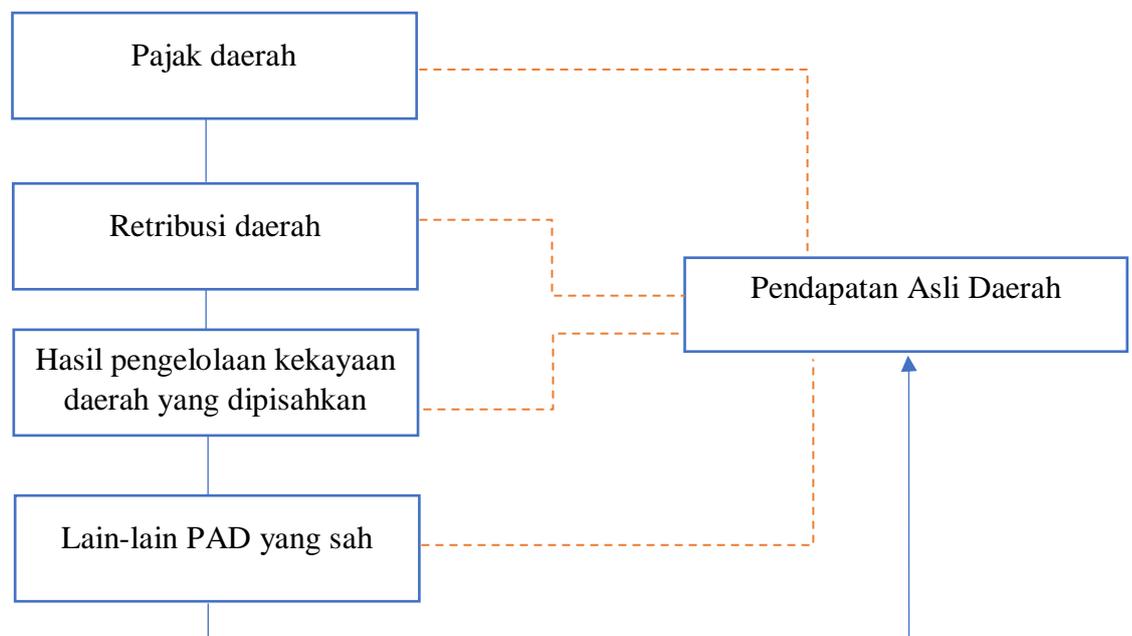
Penelitian yang dilakukan oleh Kakasih et.al., (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2016. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Tahun 2009-2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komponen pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah sebagian besar digunakan untuk mendanai belanja operasional. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan sampel dari 15 Kabupaten/Kota. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kakasih et.al., (2018) terletak pada variabel terikat, penggunaan populasi dan sampel penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan penelitian di atas menggunakan belanja modal sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemprov Lampung dan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021 yang digunakan sebagai sampel penelitian sedangkan penelitian di atas menggunakan populasi Laporan Realisasi APBD periode 2009-2016 dan 15 Kabupaten/Kota sebagai sampel penelitian.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

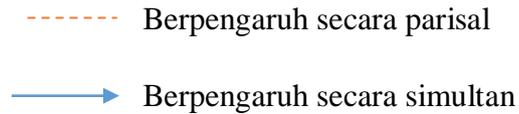
2.3.1. Kerangka Fikir

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan melalui pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli daerah maka semakin mandiri daerahnya.

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Provinsi Lampung yang dibebankan kepada rakyat dimasa pandemi covid-19 sehingga pengeluaran daerah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3.2. Hipotesis

2.3.2.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sintia dan Suryono (2019) menghasilkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₁ : Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.2.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensial selanjutnya yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi yang tinggi. Retribusi daerah memegang peranan penting dalam mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan. Semakin besar penerimaan retribusi daerah maka semakin besar pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (P. R. Ramadhan, 2019) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₂ : Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.2.3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keuangan daerah menjadi semakin mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Kireina dan Octaviani (2021) mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₃ : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.2.4. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020) menghasilkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₄ : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.2.5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen dalam Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Ramdini (2021) menunjukkan bahwa Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₅ : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)